

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH KOTA MANADO

Oleh:
Ihwan Kema

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: ihwankema@yahoo.com

ABSTRAK

Reformasi di bidang pemerintahan menyebabkan terjadinya perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai tujuan. Perubahan di bidang akuntansi yang paling diinginkan adalah adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang SAP yang digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian laporan keuangan kota Manado sesuai dengan SAP. Metode analisis yang digunakan analisis deskriptif, dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap menggambarkan laporan keuangan pemerintah kota Manado tahun 2011 sesuai dengan SAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota Manado pada tahun 2011 dalam penyajian laporan keuangan belum mengacu pada SAP, terlihat pada pos bagi hasil kepada provinsi/kab./kota dan pemerintah desa pada pos belanja serta biaya dibayar di muka pada aset lancar, tetapi secara keseluruhan laporan keuangan pemerintah kota Manado telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dengan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kata kunci: akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan

ABSTRACT

Governance reforms led to a change in the field of governmental accounting because accounting is generated through the process of financial information for the various parties to be used for the purpose. The most desirable changes accounting is the governmental accounting standards. With the issuance of Government Regulation number 71 of 2010 on government accounting standards that are used to produce a reliable financial statements and can be used as a foothold for the decision. The purpose of this study was to determine the presentation of financial statements in accordance city of Manado with government accounting standards. The analytical method used is descriptive analysis, to collect, process, and interpret the data obtained so as to give true and complete information describing financial statements Manado city government in 2011 in accordance with governmental accounting standards. The results showed that the Manado city government in 2011 in preparing the financial statements do not refer to government accounting standards, look at the post for the results of the provincial/ district/ Town and village governments in expenditure and prepaid expenses in liquid assets, but overall the financial statement Manado city government has been guided by the governmental Accounting Standards by presenting the Budget statement, Balance Sheet, statement of Cash Flows, and Notes to Financial Statements.

Keywords: government accounting, government accounting standards, the financial statements

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur dari posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Tujuan umum pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dan mendemonstrasikan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan dengan menyediakan informasi mengenai sumber-sumber alokasi dan penggunaan sumber-sumber daya finansial, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya, menyediakan informasi tentang kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan didalamnya, serta menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas atas hal biaya jasa, efisiensi dan pencapaian tujuan. Tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005. Diharapkan setelah Peraturan Pemerintah ini terbit maka akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya, baik berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 terdapat dua buah lampiran. Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014, sedangkan lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014.

Penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah Kota Manado masih mengalami kendala atau masalah yang menyebabkan penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berjalan mulus sesuai yang diharapkan, di antaranya adalah lahan 16 % di kawasan reklamasi pantai di Manado merupakan kelemahan, karena belum sepenuhnya dapat direalisasikan oleh pemerintah Kota Manado, dan hal ini bukan merupakan tindak pidana korupsi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2011 yang diaudit tahun 2012 menghasilkan pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*), dari hasil Laporan Keuangan tahun 2010 yang diaudit tahun 2011 yang menghasilkan pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*) dari BPK.

LKPD Kota Manado telah mengalami peningkatan dari status pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*) dari BPK tahun 2011 menjadi pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*) tahun 2012. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*), Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*), Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*), pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*) dan pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*) merupakan pernyataan profesional pemeriksa (BPK) mengenai kewajaran informasi yang didasarkan pada 4 kriteria, yaitu sebagai berikut.

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan pada Pemerintah Kota Manado. Tanpa adanya standar umum ini, maka laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah bisa jadi berbeda-beda antar daerah yang pada akhirnya memunculkan persoalan-persoalan baru di tingkat nasional. Peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Manado saat ini masih terus di upayakan karena dalam pelaksanaannya belum dicapai hasil yang memuaskan sesuai pedoman yang ditetapkan, hal itu terlihat dari hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*) pada laporan keuangan pemerintah Kota Manado tahun 2011. Kesalahan dan ketertiban baik dalam pengelolaan, penyusunan atau penyajian laporan keuangan di pemerintah daerah saat ini masih menjadi isu sentral. Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), diharapkan agar laporan keuangan pemerintah Kota Manado berpedoman pada SAP yang berlaku sehingga laporan keuangan pemerintah Kota Manado pada tahun-tahun selanjutnya mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*) dari BPK.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pemerintah Kota Manado berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Horngrén, *et al* (2009 : 4) yang diterjemahkan oleh Muhammad menyatakan akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi menjadi laporan keuangan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pembuat keputusan. Weygandt, *et al* (2007 : 4) yang diterjemahkan oleh Yulianto dkk mendefinisikan akuntansi (*accounting*) adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan keuangan.

Akuntansi Pemerintahan

Bastian dalam Mursyidi (2009 : 1) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (Halim, 2007 : 75).

Laporan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pasal 1 ayat 6 yang dimaksud keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat prinsip, norma, asas, landasan umum dalam perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Darise, 2009 : 25). Akuntabilitas publik pemerintah daerah adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2009: 32).

Tanjung (2012: 12) menyatakan pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi sebagai berikut.

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan pengguna sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Mahmudi (2010: 11) menyatakan laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri berikut.

1. Relevan. Artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan.

2. Andal (*Reliability*). Artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi.
3. Dapat dibandingkan (*comparability*). Artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembandingan kinerja masa lalu atau pembandingan kinerja organisasi lain yang sejenis.
4. Dapat dipahami (*understandability*). Artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 pasal 1 ayat 5 menyatakan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, sedangkan pasal 1 ayat 6 menyatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Komponen Laporan Keuangan Daerah

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi sebagai berikut.

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran (PSAP No. 2 Ayat 6, 2005).

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Darise, 2008 : 95). Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (PSAP NO. 1 ayat 38, 2005). Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca (PSAP No. 1 ayat 39, 2005).

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut.

1. Kas dan setara kas
2. Investasi jangka pendek
3. Piutang pajak dan bukan pajak
4. Persediaan
5. Investasi jangka panjang
6. Aset tetap
7. Kewajiban jangka pendek
8. Kewajiban jangka panjang
9. Ekuitas dana (PSAP No. 1 ayat 43, 2005).

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan non-anggaran (PSAP No. 3 ayat 14, 2005). Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar (PSAP No. 3 ayat 18, 2005).

Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang (PSAP No. 3 ayat 23, 2005). Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang (PSAP No. 3 ayat 26, 2005). Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang

berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Negara/Daerah (PSAP No. 3 ayat 29, 2005).

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Untuk menghindari kesalahpahaman, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana posisi dan kondisi keuangan/fisikal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai sehingga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hartina (2009)	Analisis penyajian laporan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Langkat.	Metode Deskriptif	Masih Terjadi kesalahan pencatatan karena menggunakan Kep.Mandagri No.29 tahun 2002	Meneliti tentang laporan keuangan daerah	Tidak menganalisis kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
2	Sinaga (2008)	Tinjauan atas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan pada pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.	Metode Deskriptif	Peralatan yang kurang memadai dalam penyusunan laporan keuangan dan SDM yang masih kurang serta perhitungan APBD yang kurang sesuai karena tidak adanya perbandingan dengan tahun sebelumnya	Meneliti tentang penyusunan laporan keuangan daerah	Peneliti sebelumnya tidak menganalisis laporan keuangan daerah terhadap standar akuntansi pemerintahan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu Pemerintah Kota Manado untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai oleh penulis pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 pada Pemerintah Kota Manado.

Metode Pengumpulan Data

Salah satu kegiatan dalam penelitian ini adalah merumuskan teknik pengumpulan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Agar diperoleh data dan keterangan yang lengkap maka harus menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat. Untuk itu, teknik yang di gunakan dalam penelitian ini adalah survei lapangan, metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam survei lapangan ini penelitian digunakan dengan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan menyalin atau mencatat data-data yang terdapat di Pemerintah Kota Manado yang berkaitan dengan laporan keuangan tahun 2011.

Jenis Data

Data kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penafsiran kuantitatif yang kuat. Jadi data kuantitatif merupakan nilai dari perubahan yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka (Pasolong, 2012:70). Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan data kuantitatif yang berupa laporan keuangan Pemerintah Kota Manado tahun 2011.

Sumber Data

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Jadi, data sekunder merupakan data yang dikumpulkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya (Pasolong, 2012:70). Data sekunder dalam penyusunan skripsi ini adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan dan analisis dokumen meliputi Undang-Undang, Instruksi Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah mengenai objek penelitian.

Metode Analisa

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap yakni laporan keuangan pemerintah Kota Manado tahun 2011, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran pemerintah Kota Manado tahun 2011 menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran baik pada pos pendapatan, belanja dan pembiayaan. Realisasi anggaran pemerintah Kota Manado tahun 2011 ini di susun berdasarkan realisasi pendapatan dan pengeluaran belanja serta pembiayaan yang masuk kedalam atau dikeluarkan dari bendahara umum daerah, khusus untuk pengeluaran pengisian kas yang diberikan kepada pemegang kas, realisasinya didasarkan atas pengesahan pertanggungjawaban. Tujuan dari Laporan Realisasi Anggaran adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang ditetapkan, dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasikan surplus atau menutup defisit.

Neraca

Neraca pemerintah Kota Manado tahun 2011 merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas.

Laporan Arus Kas

Tujuan penyusunan Laporan Arus Kas pemerintah Kota Manado adalah untuk menyajikan perkembangan kas yang menjadi informasi keuangan tentang sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama tahun 2011. Laporan Arus Kas pemerintah Kota Manado menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasional, aktivitas aset nonkeuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Berbagai jenis laporan keuangan pemerintah Kota Manado, merupakan rangkuman yang berisikan tentang maksud dan tujuan, landasan hukum maupun tentang kebijakan ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD adalah Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan untuk setiap pos pada laporan keuangan mengikuti standar yang berlaku yang mengatur pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan.

Pembahasan

Analisis penyajian Laporan Realisasi Anggaran dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pemerintah Kota Manado tahun 2011 belum sesuai PSAP No. 2 ayat 14 tahun 2005. Laporan Realisasi Anggaran mencakup pos-pos berikut.

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer

4. Surplus atau defisit
5. Penerimaan pembiayaan
6. Pengeluaran pembiayaan
7. Pembiayaan neto
8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan menunjukkan penyajian laporan keuangan pemerintah Kota Manado tahun 2011 pada pos pendapatan telah sesuai dengan PSAP No. 2 ayat 22, 23 dan 24 tahun 2005. Dimana pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan daerah pemerintah Kota Manado terdiri dari tiga komponen, yaitu sebagai berikut.

1. Pendapatan asli daerah
2. Pendapatan transfer
3. Lain-lain pendapatan yang sah.

Penyajian belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial telah sesuai dengan PSAP No. 2 ayat 36 tahun 2005, sedangkan belanja bagi hasil kepada provinsi/kab./kota dan pemerintah desa tidak termasuk dalam belanja operasi maka hal ini tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun penyajian pos belanja operasi pemerintah kota Manado disajikan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pos belanja pemerintah Kota Manado tahun 2011 telah mengacu pada PSAP No. 2 ayat 36 sampai 39 tahun 2005 dengan mengklasifikasikan belanja menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
2. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
3. Belanja lain-lain/tak terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja pemerintah Kota Manado selama tahun 2011 dicatat dalam pos surplus/defisit. Pemerintah Kota Manado telah menyajikan surplus/defisit dengan baik sesuai dengan PSAP No. 2 ayat 47, 48, dan 49 tahun 2005.

Pembiayaan pemerintah Kota Manado dikategorikan menjadi dua yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan pemerintah Kota Manado dalam periode tahun anggaran 2011 dicatat dalam pos pembiayaan netto. Pos pembiayaan pada tabel 4.3 telah mengacu pada PSAP No. 2 ayat 50 tahun 2005, dengan menyajikan pengeluaran daerah sesuai PSAP No. 2 ayat 51 tahun 2005 dan penerimaan daerah sesuai PSAP No. 2 ayat 55 tahun 2005 serta pembiayaan netto sesuai PSAP No. 2 ayat 58 dan 59 tahun 2005 secara tepat. Penyajian pos sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) pemerintah Kota Manado yang merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama tahun 2011 telah mengacu pada PSAP No. 2 ayat 60 dan 61 tahun 2005.

Penyajian Neraca dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Neraca pemerintah Kota Manado tahun 2011 telah sesuai PSAP No. 1 ayat 38 tahun 2005 yang menggambarkan posisi entitas pelaporan mengenai tiga unsur sebagai berikut.

1. Aset

Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah Kota Manado sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2. Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah Kota Manado. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain atau lembaga internasional.

3. Ekuitas

Kekayaan bersih pemerintah Kota Manado yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah tahun 2011.

Neraca pemerintah Kota Manado telah mengacu pada PSAP No. 1 ayat 43 tahun 2005 dengan mencantumkan pos-pos berikut.

1. Kas dan setara kas
2. Investasi jangka pendek
3. Piutang pajak dan bukan pajak
4. Persediaan
5. Investasi jangka panjang
6. Aset tetap
7. Kewajiban jangka pendek
8. Kewajiban jangka panjang
9. Ekuitas dana.

Penyajian aset lancar pemerintah Kota Manado yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan telah berpedoman pada PSAP No. 1 ayat 48 dan 49 tahun 2005, namun penyajian pos biaya dibayar di muka tidak sesuai dengan SAP karena dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 belum diatur tentang pos biaya dibayar dimuka, tetapi pos biaya dibayar di muka tetap disajikan pada aset lancar dengan mengacu pada Kepmendagri No. 29 tahun 2002. Aset Non-lancar pemerintah Kota Manado mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non-lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya telah sesuai PSAP No. 1 ayat 50 dan 51 tahun 2005.

Pemerintah Kota Manado memiliki investasi jangka panjang meliputi investasi non-permanen dan investasi permanen. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah Kota Manado telah menyajikan investasi jangka panjang sesuai PSAP No. 1 ayat 52 sampai 56 tahun 2005. Aset tetap, dana cadangan dan aset non-lancar lainnya pemerintah Kota Manado tahun 2011 telah sesuai dengan SAP. Aset tetap yang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan telah mengacu pada PSAP No. 1 ayat 57 dan 58 tahun 2005, sedangkan dana cadangan dan aset non-lancar lainnya telah mengacu pada PSAP No. 1 ayat 59 dan 60 tahun 2005. Berpedoman pada PSAP No. 1 ayat 69 sampai 74 tahun 2005 maka penyajian pos kewajiban pemerintah Kota Manado telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Kewajiban yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek atau lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah utang pemerintah yang jatuh temponya kurang dari satu tahun, sedangkan kewajiban jangka panjang adalah utang pemerintah daerah yang jatuh temponya lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan.

Pengungkapan secara terpisah tentang ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan yang disajikan pada laporan keuangan pemerintah Kota Manado tahun 2011 menjelaskan bahwa pos ekuitas pada neraca telah berpedoman pada PSAP No. 1 ayat 78 sampai 81 tahun 2005. Ekuitas dana pemerintah Kota Manado dikelompokkan sebagai berikut.

1. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.
2. Ekuitas dana investasi yang mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
3. Ekuitas dana cadangan yang mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi yang disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Laporan Arus Kas pemerintah Kota Manado tahun 2011 telah sesuai PSAP No. 3 ayat 14 tahun 2005 yang diklasifikasikan dalam empat komponen aktivitas, yaitu sebagai berikut.

1. Arus kas dari aktivitas operasional
2. Arus kas dari aktivitas aset nonkeuangan
3. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
4. Arus kas dari aktivitas nonanggaran.

Penyajian arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih aktivitas operasi telah sesuai PSAP No. 3 ayat 18, 19 dan 20 tahun 2005 dengan menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran belanja pegawai, Belanja barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan sosial, Belanja lain-lain/tak terduga, dan Transfer keluar. Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Penyajian arus kas masuk yang terdiri dari penjualan kendaraan dinas roda dua dan roda empat serta arus kas keluar yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya menunjukkan bahwa Laporan Arus Kas pemerintah Kota Manado tahun 2011 pada pos aktivitas kas dari aset nonkeuangan telah sesuai PSAP No. 3 ayat 23, 24 dan 25 tahun 2005.

Arus kas dari aktivitas pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Arus Kas pemerintah Kota Manado tahun 2011 telah mengacu pada PSAP No. 3 ayat 26, 27 dan 28 tahun 2005. Arus kas dari aktivitas pembiayaan pemerintah Kota Manado telah mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain sebagai berikut.

1. Penerimaan pinjaman
2. Penerimaan hasil penjualan surat utang negara
3. Penerimaan dari divestasi
4. Penerimaan kembali pinjaman
5. Pencairan dana cadangan.

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain sebagai berikut.

1. Penyertaan modal pemerintah
2. Pembayaran pokok pinjaman
3. Pemberian pinjaman jangka panjang
4. Pembentukan dana cadangan.

Arus kas dari aktivitas nonanggaran pemerintah Kota Manado pada Laporan Arus Kas mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian pos arus kas dari aktivitas nonanggaran pemerintah Kota Manado tahun 2011 telah sesuai dengan PSAP No. 3 ayat 29, 30 dan 31 tahun 2005. Catatan atas Laporan Keuangan pemerintah Kota Manado dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan pemerintah Kota Manado disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut.

1. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
3. Kebijakan akuntansi yang penting
4. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
5. Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual
6. Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.

Dari penjelasan yang ada, maka Catatan atas Laporan Keuangan pemerintah Kota Manado tahun 2011 telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 4 tahun 2005.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyajian belanja bagi hasil kepada provinsi/kab./kota dan pemerintahan desa tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, karena pos belanja bagi hasil kepada provinsi/kab./kota dan pemerintah desa tidak termasuk dalam PSAP No. 2 ayat 36 tahun 2005. Dimana yang termasuk dalam belanja operasi pada PSAP No. 2 ayat 36 tahun 2005 adalah belanja pegawai, belanja barang, bunga, hibah, dan bantuan sosial. Namun penyajian pos bagi hasil kepada provinsi/kab./kota dan pemerintahan desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
2. Pos aset lancar yang mencatat pos biaya dibayar di muka tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, karena aset lancar dalam PSAP No. 1 ayat 49 tahun 2005 meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Namun penyajian pos biaya dibayar dimuka mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002.
3. Secara keseluruhan penyajian laporan keuangan pemerintah Kota Manado pada tahun 2011 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2005.

Saran

Saran yang dapat diberikan agar bermanfaat bagi pemerintah Kota Manado pada tahun anggaran berikutnya hendaknya telah berpedoman penuh pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku dalam penyajian laporan keuangan pemerintah Kota Manado agar tercipta laporan keuangan daerah yang benar-benar efektif terwujud dan berguna bagi pengguna laporan keuangan tersebut serta lebih meningkatkan kualitas SDM para pegawai terutama pada subbagian akuntansi dan pelaporan melalui sosialisasi peraturan baru dan pelatihan-pelatihan akuntansi agar faktor kesalahan manusia (*human error*) dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. PT. Indeks. Jakarta.
- _____. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Indeks. Jakarta.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2009. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Hartina, Silka. 2009. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2012. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Alfabeta. Bandung.
- Horngren, Charles., Harrison, Walter T., Bamber, Linda S. 2009. *Pengantar Akuntansi*. Edisi 6 Jilid 1. diterjemahkan oleh Muhammad, Berlian. PT. Indeks. Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung
- Republik Indonesia. 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Jakarta.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- _____. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- _____. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Sinaga, Sandy Sera. 2008. Tinjauan Atas Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Weygandt, Jerry., Kieso, Donald., Kimmel, Paul. 2007. *Pengantar Akuntansi*. Edisi 7 diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianto. Salemba Empat. Jakarta.